



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Tahun 2024, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



LKjIP BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Tahun 2024 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Tenggarong, 19 Februari 2025

Kepala Pelaksana
BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara


Setianto Nugroho Aji, SH., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671027 199403 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR TABEL	II
DAFTAR ISI	III
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Penjelasan Umum Organisasi	1
1.2. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
2.1. Ringkasan Perjanjian Kinerja	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	10
3.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	11
3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023	18
3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja s/d tahun ini dengan Target RPJMD	28
3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan dan atau Kegagalan/Peningkatan dan Atau Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	29
3.1.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	31
3.1.6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja sasaran Strategis	33
3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2024	38
BAB IV PENUTUP	43
4.1. Kesimpulan	43
4.2. Perbaikan Kedepan	45
 LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024	
3. Matrik Renstra BPBD Tahun 2021 - 2026	
4. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	4
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	6
Tabel 3. Skala Nilai Peringkat Kinerja	11
Tabel 4. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	12
Tabel 5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023	19
Tabel 6. Perbandingan Realisasi Kinerja s/d tahun ini dengan Target Renstra	29
Tabel 7. Analisis Penyebab Keberhasilan dan atau Kegagalan/Peningkatan dan Atau Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.....	30
Tabel 8. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	32
Tabel 9. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja sasaran Strategis.....	36
Tabel 10. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	38
Tabel 11. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2023.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Penjelasan Umum Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, merupakan Organisasi perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan kebakaran dan bencana di daerah serta berada pada posisi yang sangat strategis karena dapat menentukan tingkat kualitas dalam penanganan kebakaran dan bencana di daerah yaitu dengan melakukan antisipasi pengurangan resiko sebelum bencana terjadi. Selain itu juga memiliki kewenangan untuk mengendalikan dan mengevaluasi penanganan bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan Pasal 2 pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 2 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menyebutkan bahwa BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara berkedudukan :

1. BPBD merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya subbidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan Daerah.
2. BPBD sebagaimana dimaksud pada huruf (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Demikian juga pada Pasal 3, yang menyebutkan tugas dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah :

1. BPBD mempunyai tugas sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya subbidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan Daerah.

2. BPBD mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya subbidang penanggulangan bencana;
- b. Pelaksanaan program kerja dan administrasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya subbidang penanggulangan bencana;
- c. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya subbidang penanggulangan bencana;
- d. Penyusunan laporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya subbidang penanggulangan bencana; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

1.2 Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Organisasi perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah serta berada pada posisi yang sangat strategis karena dapat menentukan tingkat kualitas dalam penanganan bencana di daerah yaitu dengan melakukan antisipasi pengurangan resiko sebelum bencana terjadi. Selain itu juga memiliki kewenangan untuk mengendalikan dan mengevaluasi penanganan bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan wilayah rawan akan bencana. Hal ini dikarenakan topografi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang sebagian besar bergelombang dan berbukit dengan kemiringan landai sampai curam. kondisi ini semakin membahayakan jika praktek-praktek sistem pengelolaan sumber daya alam yang tidak seimbang, terkendali dan kurang memperhitungkan faktor lingkungan. Terkait dengan hal ini diperlukan peran yang sangat strategis dalam penanganan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara hendaknya dapat bekerja secara professional untuk keamanan masyarakat dari bencana yang akan terjadi di Kutai Kartanegara. Profesionalisme sangat dibutuhkan dalam penanganan

penanggulangan bencana di daerah karena yang akan merasakan dampaknya nanti adalah seluruh masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Salah satu sumber daya yang sangat penting dalam penanganan bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah partisipasi masyarakat, agar partisipasi masyarakat dapat tercurah secara terarah, terkoordinasi dan terkonsolidasi secara efektif maka partisipasi masyarakat perlu dikelola secara tepat.

Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara masih dirasa belum memadai. Keberadaan kantor masih belum representatif untuk penyelenggaraan organisasi dalam rangka penanganan dan penanggulangan bencana. Kondisi ini menjadi kendala internal organisasi.

Terlepas dari kondisi sarana dan prasarana masih terdapat kelemahan dalam kapasitasnya di sumber daya aparatur terkait dengan kuantitas dan kualitas. Jumlah sumber daya aparatur yang terbatas menjadikan kendala dalam operasional organisasi dan penanganan kebakaran dan bencana di daerah. Selama proses penyelenggaraan organisasi masih belum tersedia sistem ketatalaksanaan yang optimal.

Terdapat pula beberapa hal terkait dengan rawan bencana yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara seperti intensitas bencana yang cukup tinggi yang didasari oleh kondisi topografi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagaimana diketahui bahwa konservasi sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup seringkali menjadi hal yang bertolak belakang.

Meski memberikan keuntungan ekonomi yang besar namun ternyata eksplorasi telah mengubah derajat kualitas sumber daya alam. Dampak langsung kegiatan pertambangan diantaranya kerusakan ekologis seperti berkurangnya debit air sungai dan tanah, pencemaran air laut, dan kerusakan hutan hingga sedimentasi tanah. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga dapat meminimalisasi resiko bencana baik secara langsung atau tidak langsung ke masyarakat.

Berbagai permasalahan yang masih dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

a. Di aspek kebijakan Penanggulangan Bencana:

- a) Sulitnya merubah pendekatan penanggulangan bencana dari pendekatan responsif kependekatan preventif.
 - b) Pengurangan resiko bencana belum menjadi landasan dasar pembangunan pada hal hampir semua daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara rentan bencana
 - c) Penanggulangan Bencana masih bersifat sektoral dan kondisional, perlu sinkronisasi program dan kegiatan berkait pengurangan resiko bencana.
- b. Dalam aspek Kelembagaan
- a) Belum ada dan optimalnya aspek-aspek penunjang kelembagaan seperti : Pusdalops, TRC, Tim Jitu Pasna, dll
 - b) Fungsi Penanggulangan Bencana yang berpindah dari Satlak PB kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kemudian ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, kembali lagi ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara .
- c. Dalam aspek Ketugasan:
- a) Upaya Penanggulangan Bencana masih disikapi dengan cara yang sama dengan ketugasan lain, tidak ada perkecualian.
 - b) Bencana yang datang tidak terduga, sehingga harus melaksanakan fungsi kesiapsiagaan dan respon time serta tanggap darurat yang mumpuni.
 - c) Paradigma penanganan bencana yang masih cenderung bersifat responsive sehingga menimbulkan dampak yang besar.
 - d) Masih minimnya jumlah relawan siaga bencana.
 - e) Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang sekiranya akan membutuhkan biaya yang cukup besar.
 - f) Belum ada dukungan sumberdaya yang memadai, jumlah anggaran, prosedur, peralatan, sarana dan prasarana, personil.
 - g) Laporan data kebencanaan yang masih belum mutakhir dan terstandar ,sehingga menyulitkan proses tanggap darurat dan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Tabel.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas
Dan Sasaran Pembangunan Daerah

PERMASALAHAN POKOK(Eselon II)	PERMASALAHAN (Eselon III)	AKAR MASALAH (Eselon IV)
1. Pelayanan Informasi ,Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana belum optimal	1. Pelayanan Informasi Rawan bencana belum optimal.	1. Sosialisasi Informasi rawan bencana masih kurang
		2. Terbatasnya Sumberdaya Aparatur dalam pelaksanaan sosialisasi.
		3. Belum semua daerah rawan bencana terpasang rambu Informasi Bencana
	2. Pelaksanaan Pencegahan dan kesiapsiagaan masih rendah	1. Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana masih rendah

PERMASALAHAN POKOK(Eselon II)	PERMASALAHAN (Eselon III)	AKAR MASALAH (Eselon IV)
		2. Belum tersedianya sistem peringatan dini terhadap bencana (EWS). 3. Keterbatasan Peralatan Penyelamatan Diri bagi masyarakat maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya 4. Belum tersusunnya Dokumen Kontinjensi (Renkon) 5. Belum terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Kabupaten
2. Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana belum optimal	3. Pelaksanaan Penanganan Bencana , Penyelamatan dan Evakuasi Korban belum optimal	1. Keterbatasan jumlah Aparat Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana. 2. Keterbatasan Sertifikasi keahlian petugas penyelamatan dan evakuasi korban bencana 3. Keterbatasan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 4. Belum terbentuknya Tim Reaksi Bencana (TRC) Kabupaten.
3. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana belum optimal	1. Pelaksanaan Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana belum maksimal 1. Belum adanya penataan sistem dasar penanggulangan bencana di daerah	1. Keterbatasan sumberdaya dan kapasitas Aparatur dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) 2. Lemahnya Koordinasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah 3. Pelaksanaan realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana di daerah masih lambat. 1. Belum tersusunnya penataan sistem dasar penanggulangan bencana di daerah. 2. Belum terjalinnya kemitraan antar stakeholder dalam penanggulangan pasca bencana 3. Belum tersedianya Data Induk Kebencanaan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Ringkasan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan,

Tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel. 2
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan bencana	Persentase Layanan Informasi Rawan bencana	Persen	15,11
2	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	16,55
3	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	100
4	Optimalnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencana Di Daerah	Dokumen	2
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Operasi Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persen	100
6	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78
7	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Entitas akuntansi (OPD) yang menyampaikan Laporan	OPD	100

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		Keuangan tepat waktu		
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	70
9	Mewujudkan Tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100
10	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
11	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100
12	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
13	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan		100
14	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100
15	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
16	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian IKK LPPD	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun	Persen	100
17	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) triwulanan 1,2,3 paling lambat per tanggal 5 bulan berikutnya dan triwulan 4 tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya	Persen	100
18	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100
19	Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I	Persen	100

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun		
20	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
21	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir:	Jumlah	2
22	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	100
23	Penerapan Core Values ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100
24	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
25	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	100
26	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah perTriwulan	Persen	100
27	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100
28	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	100
29	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	100
30	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100
31	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga negara sesuai Standar Pelayanan Minimal	Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Persen	100
32	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
33	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	75
34	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah	Persen	100
35	Terlaksananya Program Pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Jumlah program pengentasan kemiskinan	Persen	100
36	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan penganggaran pengarusutamaan gender	Persen	100
37	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5%	Persen	100
38	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	40
39	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3.6

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
40	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	73
41	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64
42	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49.57
43	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8.95
44	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona Hijau
45	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	
46	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100
47	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	100
48	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kerangka pengukuran capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

a) Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b) Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel. 3
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
$76\% \leq 90\%$	Tinggi
$66\% \leq 75\%$	Sedang
$51\% \leq 65\%$	Rendah
$\leq 50\%$	Sangat Rendah

3.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Rata-rata realisasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 sebesar $75,70\% \leq 100\%$. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja SEDANG. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel. 4
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	%
1	Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan bencana	Persentase Layanan Informasi Rawan bencana	Persen	15,11	15,11	100
2	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	16,55	16,55	100
3	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	100	100	100
4	Optimalnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencana Di Daerah	Dokumen	2	2	100
6	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78	64,64	82,87
7	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Entitas akuntansi (OPD) yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	OPD	100	100	100
8	Meningkatnya Kualitas Pelayan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	70	98,17	140
9	Mewujudkan Tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100	100	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100	100	100

10	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100	100	100
11	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100	100	100
12		Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100	100	100
13	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	Persen	100	100	100
14	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Paling lambat bulan April	Persen	100	100	100
	Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100	100	100
15	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100	100	100

16	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian IKK LPPD	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun	Persen	100	100	100
17		Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) triwulanan 1,2,3 paling lambat per tanggal 5 bulan berikutnya dan triwulan 4 tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya	Persen	100	100	100
18	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100	100	100
19	Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) an Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun	Persen	100	100	100
20	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100	0	0
21	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir:	Jumlah	2	0	0
22	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat	Persen	100	100	100

		daerah per 30 Juni Tahun berjalan				
23	Penerapan Core Values ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100	100	100
24	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100	100	100
25	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	100	87,52	87,52
26	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah perTriwulan	Persen	100	100	100
27	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	3	3	100
28	Melaksanakan Tata Kelola Arsip	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	100	71,53	71,53
29	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	78	64,64	82,87
30	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100	0	0
31	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga negara sesuai Standar Pelayanan Minimal	Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Persen	100	100	100
32	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	0	0
33	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	75	75	100

34	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah	Persen	100	50	50
35	Terlaksananya Program Pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Jumlah program pengentasan kemiskinan	Persen	100	0	0
36	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan penganggaran pengarusutamaan gender	Persen	100	100	100
38	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	40	88,78	221,95
39	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,6	0	
40	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	78	64,64	83
41	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64	0	0
42	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49,57	-25	-50
43	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8,95	0	0
44	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	100	-25	-25
45	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100	100	100

46	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM Perangkat daerah	Persen	100	89,17	89,17
47	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	(Aplikasi Survey Kukar) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	100	0	0
48	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	100

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 75,70%. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2023) sebesar 77,64%. Terjadi penurunan kinerja sebesar 1,94%. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel. 5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Ket.
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
1	Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan bencana	Persentase Layanan Informasi Rawan bencana	Persen	12,11	12,11	100	15,11	15,11	100	
2	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	13,55	13,55	100	16,55	16,55	100	
3	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Optimalnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencana Di Daerah	Dokumen	2	2	100	2	2	100	
6	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77	86	112	78	64,62	82,85	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Ket.
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
7	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Entitas akuntansi (OPD) yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	OPD	100	100	100	100	100	100	
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	68	77,04	113	70	98,17	140	
9	Mewujudkan Tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100	100	100	100	100	100	
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100	100	100	100	100	100	
10	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100	100	100	100	100	100	
11	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap	Persen	100	100	100	100	100	100	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Ket.
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
		tahun								
12		Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100	100	100	100	100	100	
13	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	Persen	100	100	100	100	100	100	
14	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Paling lambat bulan April	Persen	100	100	100	100	100	100	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Ket.
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
15	Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100	100	100	100	100	100	
		Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100	100	100	100	100	100	
16	Terlaksannya Ketepatan Waktu Penyampaian IKK LPPD	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun	Persen	100	100	100	100	100	100	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Ket.
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
17		Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) triwulanan 1,2,3 paling lambat per tanggal 5 bulan berikutnya dan triwulan 4 tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya	Persen	100	100	100	100	100	100	
18	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100	100	100	100	100	100	
19	Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) an Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan	Persen	100	100	100	100	100	100	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Ket.
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
		oktober setiap tahun								
20	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100	0	0	100	0	0	
21		Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir:	Jumlah	3	1	33,3	2	0	0	
22	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	100	100	100	100	100	100	
23	Penerapan Core Values ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100	100	100	100	100	100	
24	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah	Persen	100	100	100	100	100	100	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Ket.
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
		APBD ditetapkan)								
25	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	100	92,79	93	100	87,52	87,52	
26	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah perTriwulan	Laporan	2	2	100	100	100	100	
27	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Level	3	3	100	3	3	100	
28	Melaksanakan Tata Kelola Arsip	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Predikat	70	70	100	100	71,53	71,53	
29	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	77	86	112	78	64,62	82,85	
30	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	1	0	0	100	0	0	
31	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga negara sesuai Standar Pelayanan Minimal	Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Persen	100	75,81	76	100	100	100	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Ket.
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
32	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	0	0	100	0	0	
33	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	100	100	100	75	75	100	
34	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	50	50	
35	Terlaksananya Program Pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Jumlah program pengentasan kemiskinan	Persen	100	0	0	100	0	0	
36	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan penganggaran pengarusutamaan gender	Persen	100	100	100	100	100	100	
38	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	100	100	100	40	88,78	221,95	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Ket.
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
39	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	100	100	100	3,6	0		
40	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	77	86	112	78	64,62	82,85	
41	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai				64	0	0	
42	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	100	-25	-25	49,57	-25	-50	
43	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	100	0	0	8,95	0	0	
44	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	100	0	0	100	-25	-25	
45	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas	Persen	100	100	100	100	100	100	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Ket.
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
		merokok atau mempromosikan produk tembakau								
46	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM perangkat daerah	Persen	68	78,55	113%	100	89,17	89,17	
47	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	(Aplikasi Survey Kukar) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen				100	0	0	
48	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	80,86	81	100	100	100	100	

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel. 6
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2024)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2024	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2024
Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	78	64,62	83
Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	12,11	12,11	100
Persentase Layanan pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	13,55	13,55	100
Persentase Layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100
Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencana di daerah	2	2	100

3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan dan atau Kegagalan/peningkatan dan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel.7
Analisis Penyebab Keberhasilan dan atau Kegagalan/peningkatan dan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis Penyebab			Solusi
Keberhasilan	Kegagalan	Penurunan Kinerja	
1	2	3	4
Akses informasi publik meningkat. Masyarakat lebih mudah memantau kinerja BPBD, Penggunaan anggaran lebih terarah, Prioritas pada program yang efektif dan lebih terkoordinasi.	Kurangnya pelatihan dan pemahaman tentang SAKIP serta Evaluasi kinerja yang tidak rutin. Tidak ada tindak lanjut	Pengumpulan data yang kurang teliti. Laporan kinerja tidak valid serta Kegagalan SAKIP berdampak signifikan pada efektivitas BPBD. Respons lambat, anggaran boros, kurang koordinasi.	Tingkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan SAKIP, Pastikan data akurat dan terpercaya serta Lakukan evaluasi kinerja secara berkala
Ketersediaan anggaran dan peralatan yang cukup mendukung kinerja. Ini memastikan penanganan yang optimal, serta lebih terkoordinasi. Respons cepat saat bencana	Dana yang tidak mencukupi menghambat program penanggulangan bencana. Ini memengaruhi efektivitas respons.	Keterbatasan anggaran, peralatan, dan personel, Alokasi anggaran tidak sesuai kebutuhan	Alokasikan anggaran yang cukup
Kerja sama yang baik antar instansi mempercepat respons terhadap bencana	Koordinasi yang buruk antar instansi memperlambat penanganan. Ini menyebabkan respons yang kurang efektif	Informasi tidak tersampaikan dengan baik. Kurangnya forum diskusi dan evaluasi	Pengembangan sistem informasi dan komunikasi untuk mendukung respon bencana
Tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana	SDM yang kurang terlatih memengaruhi kualitas penanganan bencana. Pelatihan yang memadai sangat dibutuhkan	Personel kurang terlatih dalam penanganan bencana. Kurangnya simulasi dan uji coba	Pelatihan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan personel. Ini meningkatkan respons terhadap bencana

Analisis Penyebab			Solusi
Keberhasilan	Kegagalan	Penurunan Kinerja	
1	2	3	4
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur	Masyarakat kurang memahami pentingnya mitigasi bencana dan kurang terlibat dalam upaya pencegahan.	Proses pengambilan keputusan lambat dan birokrasi berbelit	Membangun kemitraan dengan berbagai pihak termasuk organisasi non-pemerintah
	Infrastruktur yang terbatas untuk akses dan transportasi dalam penanganan bencana	Koordinasi antar bidang dan instansi terkait kurang efektif	

3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangi persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel .8
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Program	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	(6) = (3-5)
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	82,87	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	90,50	(7,63)
Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	100	Program Penanggulangan Bencana	72,86	27,14
Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	Program Penanggulangan Bencana	72,86	27,14
Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	Program Penanggulangan Bencana	72,86	27,14
Optimalnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi penanggulangan Bencana di daerah	100	Program Penanggulangan Bencana	72,86	27,14

3.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dimaksud adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja Program tahun 2024 yaitu Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinth (SAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan target sebesar 78 dan realisasinya 64,64 atau capaian kinerja sebesar 100%, target kinerja tidak tercapai.

a. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- 1) Kurangnya pelatihan dan pemahaman tentang SAKIP;
- 2) Evaluasi kinerja yang tidak rutin;
- 3) Pengumpulan data yang kurang teliti;
- 4) Laporan kinerja tidak valid ;dan
- 5) Tidak ada tindak lanjut.

b. Solusi/rekomendasinya adalah :

- 1) Tingkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan SAKIP;
- 2) Pastikan data akurat dan terpercaya;dan
- 3) Melakukan evaluasi kinerja secara berkala.

2) Program Penanggulangan Bencana

Indikator kinerja Program tahun 2024 , yaitu :

1. Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana dengan target sebesar 15,11 dan realisasinya 15,11 atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai.

a. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- 1) Sosialisasi Informasi rawan bencana masih kurang ;
- 2) Terbatasnya Sumberdaya Aparatur dalam pelaksanaan sosialisasi dan ;
- 3) Belum semua daerah rawan bencana terpasang rambu Informasi Bencana

b. Solusi/rekomendasinya adalah :

- 1) Meningkatkan Sosialisasi Informasi rawan bencana ;
- 2) Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur yang melaksanakan sosialisasi ;
- 3) Peningkatan penyediaan dan pemasangan rambu dan papan informasi bencana dan ;

- 4) Menyusun Standarisasi Penyebaran Informasi Bencana.
2. Persentase Layanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana dengan target kinerja sebesar 16,55 dan realisasinya 16,55 atau capaian kinerja sebesar 100%, Target kinerja tidak tercapai.
 - a. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :
 - 1) Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana masih rendah
 - 2) Belum tersedianya sistem peringatan dini terhadap bencana (EWS)
 - 3) Keterbatasan Peralatan Penyelamatan Diri bagi masyarakat maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya
 - 4) Belum tersusunnya Dokumen Kontinjensi (Renkon)
 - 5) Belum terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Kabupaten.
 - b. Solusi/rekomendasinya adalah :
 - 1) Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana ;
 - 2) Penyediaan sistem peringatan dini terhadap bencana (EWS) ;
 - 3) Penyediaan peralatan penyelamatan diri bagi masyarakat maupun petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya ;
 - 4) Menyusun Dokumen Kontinjensi (Renkon) dan ;
 - 5) Membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Kabupaten.
 3. Persentase Layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan target kinerja sebesar 100 dan realisasinya 100 atau capaian kinerja sebesar 100 % target kinerja tercapai.
 - a. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :
 - 1) Belum optimalnya pelaksanaan dalam penentuan status tanggap darurat ;
 - 2) Belum optimalnya penerapan sistem komando operasi darurat ;
 - 3) Masih rendahnya kapasitas petugas tim kaji cepat ;
 - 4) Sarana prasarana penanggulangan bencana yang belum mencukupi mengingat luasnya wilayah;
 - 5) Terbatasnya kapasitas petugas pencarian dan penyelamatan;dan
 - 6) Masih kurangnya partisipasi serta kesadaran baik dari tingkat RT, desa/kelurahan, bahkan kecamatan memberikan laporan kejadian bencana.
 - b. Solusi/rekomendasinya adalah :
 - 1) Peningkatan kapasitas petugas ;
 - 2) Mengoptimalkan Pelaksanaan dalam tahapan penentuan status Tanggap Darurat ;
 - 3) Mengoptimalkan Penerapan sistem komando operasi darurat ;
 - 4) Optimalisasi Tim Kaji Cepat;

- 5) Meningkatkan ketersediaan peralatan dan logistik kebencanaan ;
dan
 - 6) Menerapkan sistem Penyimpanan yang terpadu pada pergudangan Logistik PB.
4. Jumlah Dokumen Regulasi penanggulangan Bencana di daerah dengan target kinerja sejumlah 2 dan realisasinya 2 atau capaian kinerja sebesar 100%, Target Kinerja tercapai.
- a. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :
 - 1) Ketebatasan sumberdaya dan kapasitas Aparatur dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)
 - 2) Lemahnya Koordinasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah ;
 - 3) Pelaksanaan realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana di daerah masih lambat dan :
 - 4) Belum tersusunnya penataan sistem dasar penanggulangan bencana di daerah.
 - b. Solusi/rekomendasinya adalah :
 - 1) Meningkatkan sumberdaya dan kapasitas Aparatur dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)
 - 2) Meningkatkan Koordinasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah ;
 - 3) Mempercepat pelaksanaan realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana di daerah dan :
 - 4) Menyusun penataan sistem dasar penanggulangan bencana di daerah.

Tabel .9
Analisis Program /Kegiatan Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
1	2	3	4	5	(6) = (3-5)	7
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	78	64,64	82,87	Kurangnya pelatihan dan pemahaman tentang SAKIP serta Evaluasi kinerja yang tidak rutin. Tidak ada tindak lanjut
Dan Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	12,11	12,11	100	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana
Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Program Penanggulangan Bencana	13,55	13,55	100	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur mitigasi bencana

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
1	2	3	4	5	(6) = (3-5)	7
Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Program Penanggulangan Bencana	100	100	100	Tidak ada korban jiwa, terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana dan berkurangnya kerusakan infrastruktur
Optimalnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi penanggulangan Bencana di daerah	Program Penanggulangan Bencana	2	2	100	Membangun kemitraan dengan berbagai pihak termasuk organisasi non-pemerintah, dan tersusunnya sistem dasar penanggulanagan bencana

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2024 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 87,52%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel .10
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi %	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	750.000.000,00	690.778.663,00	92,10	59.221.337,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.660.143.329,00	7.675.953.872,00	79,46	1.984.189.457,00
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	225.000.000,00	220.990.080,00	98,22	4.009.920,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	975.000.000,00	774.924.909,00	79,48	200.075.091,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.160.500.000,00	1.043.174.028,00	89,89	117.325.972,00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi %	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.846.265.214,00	19.490.515.953,00	98,21	355.749.261,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.088.185.623,00	1.252.757.342,00	59,99	835.428.281,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.993.888.570,00	2.968.790.896,00	99,16	25.097.674,00
	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	255.248.000,00	160.775.820,00	82%	94.472.180,00
	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2.382.860.000,00	1.698.466.322,00	75%	684.393.678,00
	Persentase Layanan Penyelamatan dan evakuasi	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	4.148.828.560,00	3.102.942.257,00	85%	1.045.886.303,00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi %	Sisa Anggaran (Rp)
Korban Bencana	korban bencana					
Optimalnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi penanggulangan Bencana di daerah	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	875.000.000,00	619.968.073,00	40%	255.031.927,00
Total			45.360.919.296,00	39.700.038.215,00	87,52	5.660.881.081,00

Sedangkan pada tahun sebelumnya (2023) realisasi anggaran sebesar 93%, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel.11
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun Sebelumnya (2023)

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi %	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	41.167.958.037,00	39.116.488.839,00	95%	2.051.469.198,00
Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	Penanggulangan Bencana	2.215.000.000,00	1.813.915.442,00	82%	401.084.558,00

Meningkatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penanggulangan Bencana	1.749.895.550,00	1.304.134.235,00	75%	445.761.315,00
Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Penanggulangan Bencana	1.600.000.000,00		85%	240.548.790,00
Optimalnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi penanggulangan Bencana di daerah	Penanggulangan Bencana	500.000.000,00	200.864.142,00	40%	299.135.858,00
Meningkatnya kualitas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran	Persentase Pemenuhan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.135.590.766,00	1.043.810.766,00	92%	91.780.000,00

	Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran				-
	Jumlah pembentukan Balakarcana (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran)	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	646.671.584,00	629.255.000,00	97%	17.416.584,00
Meningkatnya penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	135.355.000,00	135.355.000,00	100%	-
Total			49.150.470.937,00	45.603.274.634,00	93%	3.547.196.303,00

Dengan demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan realisasi anggaran sebesar 1,4.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Secara umum capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 rata-rata sebesar 75,70% (Sedang), dengan rincian :

- 1) Capaian kinerja Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan target Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target sebesar 78 dan realisasinya 64,62 atau capaian kinerja sebesar 82,85%, target kinerja tidak tercapai.
 - a) Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :
 1. Kurangnya pelatihan dan pemahaman tentang SAKIP;
 2. Evaluasi kinerja yang tidak rutin;
 3. Pengumpulan data yang kurang teliti;
 4. Laporan kinerja tidak valid ;dan
 5. Tidak ada tindak lanjut:
 - b) Solusi/rekomendasinya adalah :
 1. Tingkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan SAKIP;
 2. Pastikan data akurat dan terpercaya;dan
 3. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala
- 2) Capaian kinerja Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana dengan target sebesar 15,11 dan realisasinya 15,11 atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai.
 - a) Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :
 1. Sosialisasi Informasi rawan bencana perjenis bencana belum tepat sasaran ;
 2. Terbatasnya Sumberdaya Aparatur dalam pelaksanaan sosialisasi dan :
 3. Belum semua daerah rawan bencana terpasang rambu dan papan Informasi Bencana
 - b) Solusi/rekomendasinya adalah :
 1. Meningkatkan Sosialisasi Informasi rawan bencana ;
 2. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur yang melaksanakan sosialisasi :
 3. Peningkatan penyediaan dan pemasangan rambu dan papan informasi bencana ;
 4. Menyusun Standarisasi Penyebaran Informasi Bencana :dan

5. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi untuk mendukung respon bencana.
- 3) Capaian Kinerja Persentase Layanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana dengan target kinerja sebesar 16,55 dan realisasinya 16,55 atau capaian kinerja sebesar 100%, Target kinerja tidak tercapai.
 - a) Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :
 1. Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana masih rendah;
 2. Belum tersedianya sistem peringatan dini terhadap bencana (EWS);
 3. Keterbatasan Peralatan Penyelamatan Diri bagi masyarakat maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya;
 4. Belum terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Kabupaten
 - b) Solusi/rekomendasinya adalah :
 1. Meningkatkan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana ;
 2. Penyediaan sistem peringatan dini terhadap bencana (EWS) ;
 3. Penyediaan peralatan penyelamatan diri bagi masyarakat maupun petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya ;
 4. Membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Kabupaten
 - 4) Capaian Kinerja Persentase Layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan target kinerja sebesar 100 dan realisasinya 100 atau capaian kinerja sebesar 100 % target kinerja tercapai.
 - a) Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :
 1. Belum optimalnya pelaksanaan dalam penentuan status tanggap darurat
 2. Belum optimalnya penerapan sistem komando operasi darurat ;
 3. Masih rendahnya kapasitas petugas tim kaji cepat ;
 4. Sarana prasarana penanggulangan bencana yang belum mencukupi mengingat luasnya wilayah;
 5. Terbatasnya kapasitas petugas pencarian dan penyelamatan;dan
 6. Masih kurangnya partisipasi serta kesadaran baik dari tingkat RT, desa/keluurahan, bahkan kecamatan memberikan laporan kejadian bencana.

b) Solusi/rekomendasinya adalah :

1. Peningkatan kapasitas petugas ;
2. Mengoptimalkan Pelaksanaan dalam tahapan penentuan status Tanggap Darurat ;
3. Mengoptimalkan Penerapan sistem komando operasi darurat ;
4. Optimalisasi Tim Kaji Cepat;
5. Meningkatkan ketersediaan peralatan dan logistik kebencanaan ; dan
6. Menerapkan sistem Penyimpanan yang terpadu pada pergudangan Logistik PB.

5) Capaian Kinerja Jumlah Dokumen Regulasi penanggulangan Bencana di daerah dengan target kinerja sejumlah 2 dan realisasinya 2 atau capaian kinerja sebesar 100%, Target Kinerja tercapai.

a) Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

1. Ketebatasan sumberdaya dan kapasitas Aparatur dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)
2. Lemahnya Koordinasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah ;
3. Pelaksanaan realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana di daerah masih lambat dan :
4. Belum tersusunnya penataan sistem dasar penanggulangan bencana di daerah

b) Solusi/rekomendasinya adalah :

1. Meningkatkan sumberdaya dan kapasitas Aparatur dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)
2. Meningkatkan Koordinasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah ;
3. Mempercepat pelaksanaan realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana di daerah :
4. Menyusun penataan sistem dasar penanggulangan bencana di daerah : dan
5. Membangun kemitraan dengan berbagai pihak termasuk organisasi non-pemerintah.

4.2. Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2024, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kapasitas Aparatur dengan Pendidikan dan Pelatihan.
- 2) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan pembentukan dan pembinaan relawan.
- 3) Meningkatkan pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman

- yang ada di kawasan tempat tinggalnya dengan mengoptimalkan dokumen kajian risiko bencana dalam pelaksanaan kegiatan.
- 4) Melakukan pendataan kebutuhan standar pelayanan informasi rawan bencana.
 - 5) Menyusun Standarisasi Penyebaran Informasi Bencana.
 - 6) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi untuk mendukung respon bencana
 - 7) Meningkatkan pengadaan dan pemasangan papan rambu informasi, peringatan dan larangan bencana yang berstandarisasi
 - 8) Memperbaiki tata kelola kegiatan.
 - 9) Mengoptimalkan Pelaksanaan dalam tahapan penentuan status Tanggap Darurat ;
 - 10) Mengoptimalkan Penerapan sistem komando operasi darurat ;
 - 11) Optimalisasi Tim Kaji Cepat;
 - 12) Meningkatkan ketersediaan peralatan dan logistik kebencanaan ; dan
 - 13) Menerapkan sistem Penyimpanan yang terpadu pada pergudangan Logistik PB.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Tenggarong, 19 Februari 2025

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara



Setianto Nugroho Aji, SH.,M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671027 199403 1 008

LAMPIRAN – LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SETIANTO NUGROHO AJI, SH.,M.Si
Jabatan : KEPALA PELAKSANA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.
Jabatan : BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

- 1 Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
- 2 Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
- 3 Melaksanakan penilaian dan rencana kinerja pegawai serta nilai-nilai ASN "BerAKHLAK"
- 4 Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa secara efektif, transparan dan akuntabel;
- 5 Melaksanakan secara konsisten proses tata kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan
- 6 Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Milik Daerah;

- 7 Melaksanakan pemantauan pencapaian Standar Pelayanan Minimal dalam upaya mengukur pemenuhan kebutuhan dasar warga negara;
- 8 Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
- 9 Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
- 10 Melaksanakan upaya mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien;
- 11 Melaksanakan Manajemen Resiko program dan kegiatan Perangkat Daerah;
- 12 Memastikan terlaksananya pembangunan yang berbasis kesetaraan gender;
- 13 Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
- 14 Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
- 15 Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
- 16 Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan kemiskinan;
- 17 Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
- 18 Melaksanakan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 19 Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
- 20 Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 21 Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 08 Januari 2024

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Pihak Pertama,
KEPALA PELAKSANA


SETIANTO NUGROHO AJI, SH., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196710271994031008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan bencana	Persentase Layanan Informasi Rawan bencana	Persen	15,11
2	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	16,55
3	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	100
4	Optimalnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencana Di Daerah	Dokumen	2
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Operasi Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persen	100
6	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78
7	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Entitas akuntansi (OPD) yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	OPD	100

8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	70
9	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100
10	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
11	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100
12	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
13	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	Persen	100
14	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100

15	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
16	Terlaksannya Ketepatan Waktu Penyampaian IKK LPPD	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun	Persen	100
17	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) triwulanan 1,2,3 paling lambat per tanggal 5 bulan berikutnya dan triwulan 4 tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya	Persen	100
18	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100
19	Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun	Persen	100
20	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100

21	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir:	Jumlah	2
22	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	100
23	Penerapan Core Values ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100
24	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
25	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70
26	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
27	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100
28	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	100
29	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	100
30	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100

31	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga negara sesuai Standar Pelayanan Minimal	Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Persen	100
32	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
33	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	75
34	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah	Persen	100
35	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Jumlah program pengentasan kemiskinan	Jumlah	1
36	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan penganggaran pengarusutamaan gender	Persen	100
37	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5%	Persen	100
38	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	40
39	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,6
40	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	73

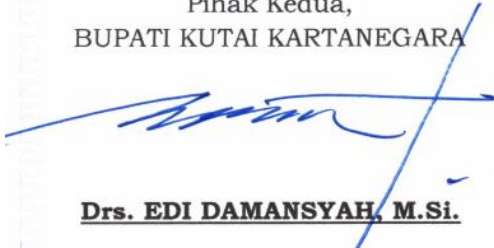
41	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64
42	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49,57
43	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8,95
44	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona Hijau
45	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100
46	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100
47	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	100
48	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	11.853.000.000	APBD
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.588.880.298	APBD
JUMLAH ANGGARAN		48.441.880.298	APBD

Kutai Kartanegara, 08 Januari 2024

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Pihak Pertama,
KEPALA PELAKSANA


SETIANTO NUGROHO AJI, SH., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196710271994031008



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SETIANTO NUGROHO AJI, SH.,M.SI

Jabatan : KEPALA PELAKSANA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. EDI DAMANSYAH, M.SI.

Jabatan : BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
3. Melaksanakan penilaian dan rencana kinerja pegawai serta nilai-nilai ASN "BerAKHLAK";
4. Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa secara efektif, transparan dan akuntabel;
5. Melaksanakan secara konsisten proses tata kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan
6. Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Milik Daerah;
7. Melaksanakan pemantauan pencapaian Standar Pelayanan Minimal dalam upaya mengukur pemenuhan kebutuhan dasar warga negara;
8. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
9. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
10. Melaksanakan upaya mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien;

11. Melaksanakan Manajemen Resiko program dan kegiatan Perangkat Daerah;
12. Memastikan terlaksananya pembangunan yang berbasis kesetaraan gender;
13. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
14. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
15. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
16. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan kemiskinan;
17. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
18. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
20. Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah;
21. Terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Perangkat Daerah;
22. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
23. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

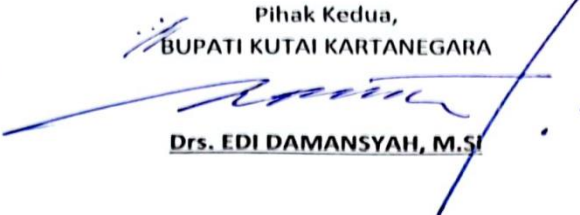
Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini
2. Mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

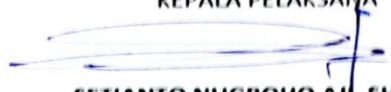
Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si

Pihak Pertama,
KEPALA PELAKSANA


SETIANTO NUGROHO Aji, SH., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 196710271994031008

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan bencana	Persentase Layanan Informasi Rawan bencana	Persen	15,11
2	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	16,55
3	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	100
4	Optimalnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencana Di Daerah	Dokumen	2
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Operasi Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persen	100
6	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78
7	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Entitas akuntansi (OPD) yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	OPD	100
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	70

9	Mewujudkan Tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100
10	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
11	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100
12	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
13	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	Persen	100
14	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100
15	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKJIP	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
16	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian IKK LPPD	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun	Persen	100

17	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) triwulanan 1,2,3 paling lambat per tanggal 5 bulan berikutnya dan triwulan 4 tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya	Persen	100
18	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100
19	Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun	Persen	100
20	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
21	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir:	Jumlah	2
22	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	100
23	Penerapan Core Values ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100
24	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
25	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	100

26	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
27	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100
28	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	100
29	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	100
30	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100
31	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga negara sesuai Standar Pelayanan Minimal	Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Persen	100
32	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
33	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	75
34	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah	Persen	100
35	Terlaksananya Program Pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Jumlah program pengentasan kemiskinan	Persen	100
36	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan penganggaran pengarusutamaan gender	Persen	100
37	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5%	Persen	100
38	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	40
39	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3.6
40	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	73

41	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64
42	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49.57
43	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8.95
44	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona Hijau
45	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100
46	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100
47	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	100
48	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	7.661.936.560,00	APBD-P
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KBAUPATEN/KOTA	37.698.928.735,00	APBD-P
	JUMLAH ANGGARAN	45.360.919.296,00	APBD-P

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si

Pihak Pertama,
KEPALA PELAKSANA


SETIANTO NUGROHO AJI, SH., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 196710271994031008

MATRIK RENSTRA

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2023		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja BPBD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai	B	B	16.408.683.145	B	16.281.183.145	B+	16.831.183.145	B+	16.281.183.145	B+	16.705.372.296	B+	82.507.604.876				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	9	9	450.000.000	9	450.000.000	9	450.000.000	9	450.000.000	9	450.000.000	45	2.250.000.000				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	200.000.000	7	200.000.000	7	200.000.000	7	200.000.000	7	200.000.000	35	1.000.000.000				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDDokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000				
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	750.000.000				

Tujuan	Ssaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2023		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	Laporan	114	114	9.701.750.195	114	9.701.750.195	114	9.701.750.195	114	9.701.750.195	114	9.475.939.346	570	48.282.940.126		
		Penyediaan Gaji dannTunjangan ASN	Jumlah ASN Yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Orang/Bulan	88	88	9.261.750.195	88	9.261.750.195	88	9.261.750.195	88	9.261.750.195	88	9.035.939.346	440	46.082.940.126		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Waktu penatausahaan dan pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	14	14	80.000.000	14	80.000.000	14	80.000.000	14	80.000.000	14	80.000.000	70	400.000.000		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	12	360.000.000	12	360.000.000	12	360.000.000	12	360.000.000	12	360.000.000	60	1.800.000.000		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	175	340.000.000	25	150.000.000	175	400.000.000	25	150.000.000	175	400.000.000	575	1.440.000.000		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang Diadakan	Unit	150	150	250.000.000	0	-	150	300.000.000	0	-	150	300.000.000	450	850.000.000		
		Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Orang	-	-	-	15	150.000.000	-	-	15	150.000.000	-	-	30	300.000.000		

Tujuan	Ssaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2023		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	25	25	90.000.000	-	25	100.000.000	-	25	100.000.000	75	290.000.000				
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	-	-	-	10	150.000.000	-	-	10	150.000.000	-	-	20	300.000.000		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	150	150	843.500.000	150	933.500.000	150	933.500.000	150	933.500.000	150	933.500.000	750	4.577.500.000		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis	100	100	10.500.000	100	10.500.000	100	10.500.000	100	10.500.000	100	10.500.000	500	52.500.000		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	1700	1700	110.000.000	1700	110.000.000	1700	110.000.000	1700	110.000.000	1700	110.000.000	8500	550.000.000		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jenis	120	120	50.000.000	120	65.000.000	120	65.000.000	120	65.000.000	120	65.000.000	600	310.000.000		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jenis/Porsi/Kotak	2890	2890	75.000.000	2890	100.000.000	2890	100.000.000	2890	100.000.000	2890	100.000.000	14450	475.000.000		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Buku/Lembar/Buah	7500	7500	85.000.000	7500	85.000.000	7500	85.000.000	7500	85.000.000	7500	85.000.000	37500	425.000.000		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan advetorial yang disediakan	Eksemplar/Buku/Kali	2190	2190	58.000.000	2190	58.000.000	2190	58.000.000	2190	58.000.000	2190	58.000.000	10950	290.000.000		

Tujuan	Ssaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2023		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
		Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Orang/Kali	35	35	330.000.000	35	330.000.000	35	330.000.000	35	330.000.000	35	330.000.000	175	1.650.000.000		
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengelolaan arsip (UPPA) serta pada Unit kearsipan (UK)	Berkas	100	100	75.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	500	475.000.000		
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat daerah	Sistem/Aplikasi	12	12	50.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	60	350.000.000		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit/Kali	165	50	200.000.000	90	150.000.000	200	450.000.000	90	150.000.000	215	550.000.000	645	1.500.000.000		
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	90	-	-	90	150.000.000	90	150.000.000	90	150.000.000	90	150.000.000	360	600.000.000		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit/Kali	75	50	200.000.000	-	-	110	300.000.000	-	-	125	400.000.000	285	900.000.000		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	Bulan	12	12	4.193.432.950	12	4.155.932.950	12	4.155.932.950	12	4.155.932.950	12	4.155.932.950	60	20.817.164.750		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	Bulan	990	990	5.000.000	990	7.500.000	990	7.500.000	990	7.500.000	990	7.500.000	4950	35.000.000		

[illegible]

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Bencana	Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1) Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	persen	5,11	8,1	3.025.000.000	12,1	3.215.000.000	15,1	3.225.000.000	18,1	3.200.000.000	21,1	3.175.000.000	24,61	15.840.000.000	BP BD	
	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		2) Persentase Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	persen	8,5	10,6		13,6		16,6		19,6		22,6		29,1			
	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		3) Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persen	100	100		100		100		100		100		100			
			4) Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencana di daerah	Dokumen	0	2		2		2		2		2		10			
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	persen	5,11	8,1	150.000.000	12,1	150.000.000	15,1	200.000.000	18,1	150.000.000	21,1	150.000.000	24,61	800.000.000		
		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota (lanjutan)	jumlah dokumen	Dokumen	1	-	-	-	-	1	200.000.000					1	200.000.000		
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Peserta Sosialisasi dan edukasi	Orang	-	150	150.000.000	150	150.000.000	-	-	150	150.000.000	150	150.000.000	600	600.000.000		

		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	persen	8,5	10,6	925.000.000	13,6	965.000.000	16,6	925.000.000	19,6	950.000.000	22,6	925.000.000	29,10	4.690.000.000		
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPB	Dokumen	-		-		-	-	-	1	300.000.000			1	300.000.000		
		Pelatihan Dan Pencegahan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta pelatihan	Orang	-	150	150.000.000	150	150.000.000	150	150.000.000		-	150	150.000.000	600	600.000.000		
		Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah status tanggap darurat bencana	status	-	1	150.000.000	1	-		150.000.000		-	1	150.000.000	3	450.000.000		
		Penyediaan Peralatan Dan Perlindungan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Perlindungan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jenis	-	30	175.000.000		-	30	175.000.000		-	30	175.000.000	90	525.000.000		
		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Bencana di daerah	bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0	-		
		Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Destana	12	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	20	1.000.000.000		
		Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Pasca Bencana	kejadian		20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	100	500.000.000		

		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Reaksi Cepat (TRC)	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi	Dokumen		1	150.000.000	1	200.000.000	1		1	200.000.000	1	-	5	550.000.000		
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap bencana	Jumlah Peserta Gladi	Orang	-	-	-	100	15.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	400	465.000.000		
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen RPKB	Dokumen	-	-	-	1	300.000.000	-	-	-	-	-	-	1	300.000.000		
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persen	-	100 %	1.350.000.000	100%	1.350.000.000	100%	1.350.000.000	100%	1.350.000.000	100%	1.350.000.000	100%	6.750.000.000		
		Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah waktu respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%)	persen	-	100 %	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	750.000.000		
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah waktu respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%)	persen	-	100 %	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	750.000.000		
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban	jumlah korban berhasil dicari,	persen	100 %	100 %	450.000.000	100%	450.000.000	100%	450.000.000	100%	450.000.000	100%	450.000.000	100%	2.250.000.000		

		Bencana Kabupaten/Kota	ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana																
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Waktu respon kurang dari 24 jam Penyediaan Logistik untuk setiap status darurat bencana (%)	persen	100 %	100 %	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	1.250.000.000		
		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	persen	-	100 %	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	500.000.000		
		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah Waktu respon kurang dari 24 jam untuk setiap bencana non alam epidemi/wabah penyakit (%)	persen	-	100 %	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	1.250.000.000		
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	4) Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencana di daerah	Dokumen	-	2	600.000.000	2	750.000.000	2	750.000.000	2	750.000.000	2	750.000.000	10	3.600.000.000		
		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	jumlah Dokumen Penyusunan perbub RAD PB,	Dokumen	-	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	15	500.000.000		

		a	sumber daya bantuan PB dll.																
		Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Risiko Bencana	Forum	-	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	10	500.000.000		
		Kerjasama Antar Lembaga Dan kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan peningkatan sinergi antar lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.	kegiatan	-	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	15	500.000.000		
		Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Sistem informasi geografis (SIG),	sistem	-	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	10	750.000.000		
		Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1.Pengawasan sumber ancaman / bahaya.2 pengawasan kegiatan rencana bangun dan tata ruang.3 pengawasan pengelolaan keuangan / pendanaan penanggulangan bencana.4 pengawasan kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan	kegiatan	-	3	150.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	15	1.350.000.000		

		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1) Persentase Pemenuhan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	persen		10,86	12,21%	2.040.039.638	15,80%	2.040.039.638	17,55%	2.290.039.638	19,25%	2.040.039.638	20,12%	2.040.039.638	27,26%	10.450.198.190		
			2) Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran			100	100%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%			
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Kebakaran yang tertangani	Jumlah Kasus	76	20%	825.000.000	20%	825.000.000	20%	825.000.000	20%	825.000.000	20%	825.000.000	100%	4.125.000.000			
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Manusia / Penyelamatan dan Evakuasi	jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terdapat kejadian kebakaran	Jumlah Korban	74	20%	200.000.000	20%	200.000.000	20%	200.000.000	20%	200.000.000	20%	200.000.000	100%	1.000.000.000			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri	jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Dan Alat Pelindung	unit		120	690.039.638	75	690.039.638	110	690.039.638	75	690.039.638	110	690.039.638	490	3.450.198.190			

			Diri																
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam yang dibina	orang		100	125.000.000		125.000.000	50	125.000.000		125.000.000	50	125.000.000	200	625.000.000		
		Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	1.tersedianya sistem						1	250.000.000					1	250.000.000		
		Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, Dan Kemitraan Dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terwujudnya kerjasama antar wilayah perbatasan	wilayah			200.000.000	1	200.000.000	2	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	1.000.000.000		
		Inspeksi Peralatan Proteksi kebakaran	2) Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	persen			-		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	-	60000000,0		
		Pendataan Sarana Dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang didata	Unit			-	100	150.000.000			100	150.000.000			200	300.000.000		
		Penilaian Sarana Dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Sarana dan prasarana proteksi kebakaran	Unit			-			100	150.000.000			100	150.000.000	200	300.000.000		

			yang dinilai																
		Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase pembentukan Balakarcana (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran)	persen	33,76%	35,44%	1.025.000.000	41,77%	850.000.000	50,21%	850.000.000	60,76%	850.000.000	73,42%	850.000.000	73,42%	4.425.000.000		
		Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Kelompok /Relawan Pemadam Kebakaran	Kelompok Balakarcana	46	7	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	47	1.750.000.000		
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam kebakaran	Jumlah Kelompok /Relawan Pemadam Kebakaran yang dibentuk	Kelompok Balakarcana	72	4	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	44	1.000.000.000		
		Dukungan Pemberdayaan Masyarakat / Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana Dan Prasarana	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pemadam Kebakaran	unit	6	9	475.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	29	1.675.000.000		
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	3) Jumlah pembentukan Balakarcana (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran)	persen		100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	450.000.000	100%	200.000.000	100%	1.250.000.000		

		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Persentase Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia yang tertangani	persen			25%	200.000.000	25%	200.000.000	25%	200.000.000	25%	200.000.000	100%	800.000.000		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencarian Pertolongan terhadap kondisi membahayakan akan	Unit		50	200.000.000	100			100	250.000.000			250	450.000.000		
	Jumlah						22.698.722.783		22.736.222.783		23.546.222.783		22.971.222.783		23.120.411.934		115.072.803.066	

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
PERIODE Desember - TAHUN 2024
1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Keluaran	VOLUME/ PAGU		CAPAIAN PER TRIWULAN								TOTAL			STATUS PELAKSA NAAN (%)
				I		II		III		IV					
		K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	%.	
1.05.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
1.05.01.2.01.0001a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (BPBD)		Rp500.000.000		Rp0		Rp74.091.660		Rp44.138.200		Rp327.798.040		Rp446.027.900		89,21%	
1	1.05.01.2.01.0001a.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (BPBD)	7	Dokumen	4	Dokum en	1	Dokumen	2	Dokumen	0	Dokumen	7	Dokumen	100,00 %	100,00%
1.05.01.2.01.0006a Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (BPBD)		Rp150.000.000		Rp0		Rp72.464.128		Rp42.570.000		Rp29.552.000		Rp144.586.128		96,39%	
2	1.05.01.2.01.0006a.01 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (BPBD)	12	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	12	Laporan	100,00 %	100,00%
1.05.01.2.01.0007a Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (BPBD)		Rp100.000.000		Rp0		Rp2.490.000		Rp7.637.460		Rp75.697.175		Rp85.824.635		85,82%	

3	1.05.01.2.01.0007a.01 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (BPBD)	2	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	2	Laporan	100,00 %	100,00%
1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
1.05.01.2.02.0001a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (BPBD)		Rp9.171.643.329		Rp1.346.077.223		Rp2.407.137.982		Rp1.599.933.052		Rp1.910.400.476		Rp7.263.548.733		79,20%	
4	1.05.01.2.02.0001a.01 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (BPBD)	1.116	Orang/bulan	148	Orang/bulan	254	Orang/bulan	159	Orang/bulan	160	Orang/bulan	721	Orang/bulan	64,61%	100,00%
1.05.01.2.02.0003a Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (BPBD)		Rp86.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0,00%	
5	1.05.01.2.02.0003a.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (BPBD)	12	Dokumen	0	Dokumen	6	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	12	Dokumen	100,00 %	100,00%
1.05.01.2.02.0005a Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (BPBD)		Rp42.500.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp27.190.800		Rp27.190.800		63,98%	
6	1.05.01.2.02.0005a.01 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (BPBD)	6	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	6	Laporan	6	Laporan	100,00 %	100,00%
1.05.01.2.02.0007a Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (BPBD)		Rp360.000.000		Rp75.450.000		Rp57.696.200		Rp131.530.000		Rp60.290.000		Rp324.966.200		90,27%	
7	1.05.01.2.02.0007a.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	12	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	12	Laporan	100,00 %	100,00%

	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD (BPBD)														
1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
1.05.01.2.03.0004a Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (BPBD)		Rp225.000.000		Rp0		Rp33.192.000		Rp41.574.780		Rp146.223.300		Rp220.990.080		98,22%	
8	1.05.01.2.03.0004a.01 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (BPBD)	14	Laporan	3	Laporan	4	Laporan	3	Laporan	4	Laporan	14	Laporan	100,00%	100,00%
1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
1.05.01.2.05.0002a Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (BPBD)		Rp500.000.000		Rp0		Rp0		Rp289.320.000		Rp175.566.802		Rp464.886.802		92,98%	
9	1.05.01.2.05.0002a.01 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (BPBD)	1	Paket	0	Paket	0	Paket	1	Paket	1	Paket	2	Paket	200,00%	100,00%
1.05.01.2.05.0004a Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (BPBD)		Rp75.000.000		Rp0		Rp10.892.920		Rp0		Rp18.375.000		Rp29.267.920		39,02%	
10	1.05.01.2.05.0004a.01 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (BPBD)	1	Dokumen	0	Dokumen	3	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	4	Dokumen	400,00%	90,00%
1.05.01.2.05.0009a Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (BPBD)		Rp150.000.000		Rp0		Rp0		Rp22.433.170		Rp33.260.000		Rp55.693.170		37,13%	

11	1.05.01.2.05.0009a.01 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (BPBD)	15	Orang	0	Orang	0	Orang	2	Orang	33	Orang	35	Orang	233,33%	90,00%
1.05.01.2.05.0010a Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (BPBD)		Rp100.000.000		Rp0		Rp29.279.312		Rp4.170.000		Rp27.667.000		Rp61.116.312		61,12%	
12	1.05.01.2.05.0010a.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (BPBD)	150	Orang	26	Orang	52	Orang	0	Orang	72	Orang	150	Orang	100,00%	100,00%
1.05.01.2.05.0011a Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (BPBD)		Rp150.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp110.444.514		Rp110.444.514		73,63%	
13	1.05.01.2.05.0011a.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (BPBD)	100	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	7	Orang	7	Orang	7,00%	90,00%
1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah															
1.05.01.2.06.0001a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BPBD)		Rp10.500.000		Rp0		Rp0		Rp8.500.000		Rp2.000.000		Rp10.500.000		100,00%	
14	1.05.01.2.06.0001a.01 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (BPBD)	15	Paket	0	Paket	0	Paket	12	Paket	3	Paket	15	Paket	100,00%	100,00%
1.05.01.2.06.0002a Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (BPBD)		Rp100.000.000		Rp0		Rp0		Rp50.000.000		Rp50.000.000		Rp100.000.000		100,00%	
15	1.05.01.2.06.0002a.01 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (BPBD)	4	Paket	0	Paket	0	Paket	4	Paket	0	Paket	4	Paket	100,00%	100,00%

1.05.01.2.06.0003a Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (BPBD)		Rp65.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp65.000.000		Rp65.000.000		100,00%	
16	1.05.01.2.06.0003a.01 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (BPBD)	120	Paket	0	Pake t	0	Paket	0	Paket	120	Paket	120	Paket	100,00%	100,00%
1.05.01.2.06.0004a Penyediaan Bahan Logistik Kantor (BPBD)		Rp100.000.000		Rp0		Rp0		Rp42.375.900		Rp50.864.100		Rp93.240.000		93,24%	
17	1.05.01.2.06.0004a.01 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (BPBD)	1.700	Paket	0	Pake t	0	Paket	700	Paket	900	Paket	1.600	Paket	94,12%	100,00%
1.05.01.2.06.0005a Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (BPBD)		Rp85.000.000		Rp0		Rp0		Rp25.500.000		Rp51.425.000		Rp76.925.000		90,50%	
18	1.05.01.2.06.0005a.01 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (BPBD)	750	Paket	0	Pake t	0	Paket	200	Paket	2	Paket	202	Paket	26,93%	100,00%
1.05.01.2.06.0007a Penyediaan Bahan/Material (BPBD)		Rp100.000.000		Rp0		Rp0		Rp600.000		Rp91.170.000		Rp91.770.000		91,77%	
19	1.05.01.2.06.0007a.01 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (BPBD)	5	Paket	0	Pake t	0	Paket	1	Paket	3	Paket	4	Paket	80,00%	100,00%
1.05.01.2.06.0009a Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (BPBD)		Rp550.000.000		Rp42.643.823		Rp55.388.573		Rp45.441.235		Rp137.463.433		Rp280.937.064		51,08%	
20	1.05.01.2.06.0009a.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (BPBD)	45	Laporan	21	Lapo ran	19	Lapor an	12	Laporan	10	Laporan	62	Laporan	137,78%	100,00%
1.05.01.2.06.0010a Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (BPBD)		Rp75.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp57.130.000		Rp57.130.000		76,17%	

21	1.05.01.2.06.0010a.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (BPBD)	100	Dokumen	0	Doku men	0	Doku men	0	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2,00%	100,00%
1.05.01.2.06.0011a Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (BPBD)		Rp75.000.000		Rp0		Rp0		Rp45.750.000		Rp4.000.000		Rp49.750.000		66,33%	
22	1.05.01.2.06.0011a.01 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (BPBD)	12	Dokumen	0	Doku men	0	Doku men	3	Dokumen	2	Dokumen	5	Dokumen	41,67%	100,00%

1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
1.05.01.2.07.0002a Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (BPBD)		Rp2.246.450.280		Rp0		Rp0		Rp0		Rp2.000.270.600		Rp2.000.270.600		89,04%
23	1.05.01.2.07.0002a.01 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	14	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	14	Unit	14	Unit	100,00% 100,00%
1.05.01.2.07.0005a Pengadaan Mebel (BPBD)		Rp342.102.000		Rp0		Rp0		Rp339.459.000		Rp0		Rp339.459.000		99,23%
24	1.05.01.2.07.0005a.01 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (BPBD)	50	Paket	0	Paket	0	Paket	50	Paket	0	Paket	50	Paket	100,00% 100,00%
1.05.01.2.07.0006a Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (BPBD)		Rp4.728.955.058		Rp0		Rp685.581.363		Rp2.800.362.832		Rp1.164.132.950		Rp4.650.077.145		98,33%
25	1.05.01.2.07.0006a.01 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (BPBD)	330	Unit	0	Unit	57	Unit	39	Unit	234	Unit	330	Unit	100,00% 100,00%
1.05.01.2.07.0007a Pengadaan Aset Tetap Lainnya (BPBD)		Rp750.000.000		Rp0		Rp50.155.000		Rp192.568.900		Rp501.737.100		Rp744.461.000		99,26%
26	1.05.01.2.07.0007a.01 Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (BPBD)	1	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	1	Unit	1	Unit	100,00% 65,00%
1.05.01.2.07.0011a Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp11.778.757.876		Rp0		Rp2.180.468.000		Rp9.284.046.440		Rp290.441.460		Rp11.754.955.900		99,80%

(BPBD)															
27	1.05.01.2.07.0011a.01 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (BPBD)	125	Unit	86	Unit	98	Unit	12	Unit	0	Unit	196	Unit	156,80%	100,00%

1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
1.05.01.2.08.0001a Penyediaan Jasa Surat Menyurat (BPBD)		Rp7.500.000		Rp0		Rp3.600.000		Rp0		Rp3.600.000		Rp7.200.000		96,00%	
28	1.05.01.2.08.0001a.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (BPBD)	65	Laporan	0	Laporan	20	Laporan	0	Laporan	45	Laporan	65	Laporan	100,00%	100,00%
1.05.01.2.08.0002a Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (BPBD)		Rp150.000.000		Rp16.019.798		Rp6.569.000		Rp2.420.000		Rp23.332.000		Rp48.340.798		32,23%	
29	1.05.01.2.08.0002a.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (BPBD)	12	Laporan	1	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	2	Laporan	6	Laporan	50,00%	100,00%
1.05.01.2.08.0004a Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (BPBD)		Rp1.930.685.623		Rp271.961.917		Rp336.536.213		Rp277.913.457		Rp277.823.457		Rp1.164.235.044		60,30%	

30	1.05.01.2.08.0004a.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (BPBD)	12	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	12	Laporan	100,00%	100,00%
1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
	1.05.01.2.09.0002a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (BPBD)	Rp2.063.888.570		Rp0		Rp1.150.526.500		Rp128.184.050		Rp772.468.875		Rp2.051.179.425		99,38%	
31	1.05.01.2.09.0002a.01 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (BPBD)	98	Unit	38	Unit	33	Unit	24	Unit	3	Unit	98	Unit	100,00%	100,00%
	1.05.01.2.09.0006a Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (BPBD)	Rp80.000.000		Rp4		Rp32.873.000		Rp3.630.000		Rp40.829.856		Rp77.332.860		96,67%	
32	1.05.01.2.09.0006a.01 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (BPBD)	90	Unit	4	Unit	20	Unit	0	Unit	66	Unit	90	Unit	100,00%	100,00%
	1.05.01.2.09.0009a Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (BPBD)	Rp850.000.000		Rp0		Rp30.000.000		Rp186.437.000		Rp621.421.661		Rp837.858.661		98,57%	
33	1.05.01.2.09.0009a.01 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	0	Unit	0	Unit	3	Unit	2	Unit	5	Unit	100,00%	100,00%

	(BPBD)														
RATA-RATA														105,89%	98,03%
PREDIKAT														SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI

1.05.1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA														
1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota														
1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)		Rp255.248.000		Rp0		Rp31.160.000		Rp7.480.000		Rp68.573.320		Rp107.213.320		42,00%
3 4	1.05.03.2.01.0004.01 Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	550	Orang	0	Orang	25	Orang	0	Orang	0	Orang	25	Orang	4,55% 100,00%
1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
1.05.03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		Rp153.630.000		Rp0		Rp13.060.000		Rp52.562.750		Rp60.837.900		Rp126.460.650		82,32%
3 5	1.05.03.2.02.0006.01 Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	4	Kawasan	0	Kawasan	0	Kawasan	4	Kawasan	0	Kawasan	4	Kawasan	100,00% 100,00%
1.05.03.2.02.0008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		Rp100.000.000		Rp0		Rp7.770.000		Rp0		Rp55.770.450		Rp63.540.450		63,54%
3 6	1.05.03.2.02.0008.01 Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	25	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	25	Orang	25	Orang	100,00% 100,00%

1.05.03.2.02.0009 Penyusunan Rencana Kontinjensi		Rp750.000.000		Rp0		Rp6.260.000		Rp68.970.400		Rp275.034.232		Rp350.264.632		46,70%	
37	1.05.03.2.02.0009.01 Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	3	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100,00%	100,00%
1.05.03.2.02.0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Rp400.000.000		Rp0		Rp4.430.000		Rp11.950.500		Rp311.048.000		Rp327.428.500		81,86%	
38	1.05.03.2.02.0010.01 Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	500	Orang	0	Orang	0	Orang	93	Orang	223	Orang	316	Orang	63,20%	100,00%
1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota		Rp179.230.000		Rp0		Rp17.000.000		Rp0		Rp105.200.000		Rp122.200.000		68,18%	
39	1.05.03.2.02.0015.01 Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	30	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	30	Unit	30	Unit	100,00%	100,00%
1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Rp650.000.000		Rp0		Rp25.880.000		Rp52.560.000		Rp293.130.500		Rp371.570.500		57,16%	
40	1.05.03.2.02.0016.01 Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	150	Kawasan	0	Kawasan	0	Kawasan	2	Kawasan	10	Kawasan	12	Kawasan	8,00%	100,00%
1.05.03.2.02.0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Rp150.000.000		Rp0		Rp58.269.000		Rp17.190.000		Rp47.950.000		Rp123.409.000		82,27%	

4 1	1.05.03.2.02.0017.01 Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1	laporan	0	laporan	0	laporan	0	laporan	1	laporan	1	laporan	100,00%	100,00%
1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana															
1.05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas		Rp150.000.000		Rp0		Rp0		Rp14.524.000		Rp36.741.600		Rp51.265.600		34,18%	
4 2	1.05.03.2.03.0001.01 Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00%	100,00%
1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		Rp150.000.000		Rp0		Rp36.702.077		Rp22.670.000		Rp14.580.000		Rp73.952.077		49,30%	
4 3	1.05.03.2.03.0002.01 Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	100,00%
1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Rp950.000.000		Rp0		Rp103.920.000		Rp124.210.200		Rp437.126.801		Rp665.257.001		70,03%	
4 4	1.05.03.2.03.0003.01 Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	20.792	Orang	456	Orang	643	Orang	46	Orang	304	Orang	1.449	Orang	6,97%	100,00%
1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan		Rp2.648.828.560		Rp0		Rp408.981.579		Rp56.880.890		Rp1.749.680.110		Rp2.215.542.579		83,64%	

Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota															
4 5	1.05.03.2.03.0009.01 Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	546	Orang	147	Orang	178	Orang	301	Orang	782	Orang	1.408	Orang	257,88%	100,00%
1.05.03.2.03.0010 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit		Rp150.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		0,00%	
4 6	1.05.03.2.03.0010.01 Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	100,00%
1.05.03.2.03.0011 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		Rp100.000.000		Rp0		Rp27.550.000		Rp0		Rp69.375.000		Rp96.925.000		96,93%	
4 7	1.05.03.2.03.0011.01 Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00%	100,00%

1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana																					
1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Penanggulangan Kabupaten/Kota				Regulasi Bencana		Rp100.000.000		Rp0		Rp27.715.360		Rp24.142.240		Rp34.801.900		Rp86.659.500		86,66%			
48	1.05.03.2.04.0001.01 Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah			2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00%		100,00%			
1.05.03.2.04.0002 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota				Rp150.000.000		Rp0		Rp16.470.000		Rp14.853.250		Rp39.576.000		Rp70.899.250		47,27%					
49	1.05.03.2.04.0002.01 Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah			2	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	2	Dokumen	99,00%		99,00%			
1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				Rp150.000.000		Rp0		Rp15.850.000		Rp26.874.000		Rp18.360.000		Rp61.084.000		40,72%					
50	1.05.03.2.04.0003.01 Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana			2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100,10%		100,00%			
1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan				Rp150.000.000		Rp0		Rp42.986.900		Rp1.280.000		Rp13.470.000		Rp57.736.900		38,49%					
51	1.05.03.2.04.0004.01 Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia			2	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	62,50%		65,00%			
1.05.03.2.04.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan				Rp100.000.000		Rp0		Rp3.530.000		Rp26.215.783		Rp29.107.000		Rp58.852.783		58,85%					

Bencana															
52	1.05.03.2.04.0005.01 Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	3	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	2	Laporan	73,33%	80,00%
1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		Rp225.000.000		Rp0		Rp51.733.400		Rp1.850.000		Rp75.044.000		Rp128.627.400		57,17%	
53	1.05.03.2.04.0010.01 Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	5	Kegiatan	0	Kegiatan	1	Kegiatan	0	Kegiatan	4	Kegiatan	5	Kegiatan	100,00%	100,00%
RATA-RATA														88,78%	97,20%
PREDIKAT														TINGGI	SANGAT TINGGI

